

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul: Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Depok dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak anak khususnya dalam kasus penanganan kekerasan terhadap anak, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian (1984) untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Depok dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak, selanjutnya penulis menggunakan teori implementasi kebijakan untuk melihat apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari terlaksananya kebijakan Kota Layak Anak yang di implementasikan di Kota Depok.

Peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Depok selama tiga tahun terakhir sejak 2019 menjadi polemik tersendiri ditengah pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, karena peningkatan angka pelaporan kasus yang terjadi berbanding terbalik dengan penghargaan yang telah diraih Kota Depok dengan menempati peringkat Nindya selama 5 tahun berturut-turut.

Penulis mendapati bahwa peningkatan angka pelaporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat berbanding lurus dengan peningkatan kemiskinan yang terjadi di Kota Depok, hal ini sejalan dengan pernyataan Kemen PPPA bahwa salah satu pemicu utama dari kekerasan terhadap anak ialah karena kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Pergantian instansi yang melakukan pelayanan penanganan kasus

kekerasan nyatanya juga berdampak pada meningkatnya angka pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang lebih merata karena. Meningkatnya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dapat dianalogikan seperti kasus TB Paru dimana banyak pelaporan kasus yang terjadi maka dianggap semakin baik, karena pada akhirnya akan semakin banyak juga yang disembuhkan dari penyakit tersebut.

Melalui penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah Kota Depok sebagai pemerintah daerah yang secara otonom dapat membentuk dan melaksanakan program dan kebijakannya secara mandiri telah melaksanakan peran nya dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak khususnya pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan baik meski belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, dengan dibuktikan dari peningkatan angka pelaporan kasus yang terjadi dapat diartikan bahwa pemerintah Kota Depok telah berhasil memberikan edukasi mengenai kekerasan terhadap anak secara merata kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan fasilitas yang mumpuni untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, meski dirasa sumber daya manusia yang ada masih belum cukup untuk dapat menjangkau keseluruhan penanganan kasus yang terjadi diberbagai wilayah Kota Depok. Di masa depan, ketika sumber daya dan fasilitas yang diberikan untuk pelayanan lebih meningkat maka akan memungkinkan jika angka kasus pelaporan kekerasan terhadap anak juga akan meningkat, karena masyarakat akan lebih mudah melakukan pelaporan dan penindakan.

5.2 Saran

5.2.1. Saran Praktis

1. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia atau pekerja yang menangani secara langsung terkait pelayanan kekerasan terhadap anak pada UPTD PPA Kota Depok. Mengingat UPTD PPA memiliki tugas sebagai lembaga pengaduan masyarakat,

penjangkauan korban, pengelolaan kasus penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban yang diperuntukan untuk seluruh wilayah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota Depok perlu meninjau kembali terkait keterjangkauan tempat pelayanan kekerasan terhadap anak. Apakah lokasi yang disediakan strategis untuk dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Kota Depok
3. Pemerintah Kota Depok perlu meningkatkan publikasi terkait program-program yang dilaksanakan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dengan harapan masyarakat akan turut andil berpartisipasi didalam pelaksanaan program tersebut.
4. Koordinasi antara agen pelaksana kebijakan diharapkan dapat lebih koordinatif dan adanya keterbukaan satu dengan yang lain agar permasalahan didalam implementasi kebijakan dapat terselesaikan dan kebijakan terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan
5. Pemerintah bersama masyarakat perlu menanamkan rasa kepedulian terhadap kebijakan yang di implementasikan, agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat yang apatis membuat pelaksanaan kebijakan sulit untuk dapat terlaksana dengan baik

5.2.2. Saran Teoritis

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak baik di Kota Depok maupun di Indonesia dengan melakukan riset pada lebih banyak instansi, baik yang saat ini sedang berjalan ataupun dengan instansi yang sebelumnya digantikan seperti P2TP2A, agar data yang didapatkan lebih luas dan menyeluruh serta adanya perbandingan yang dapat dilakukan terkait instansi yang sebelumnya dan yang digantikan.